

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai langkah peningkatan rasa sejahtera bagi masyarakat, desa sudah membentuk unit usaha milik desa yang disebut BUMDes. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangat krusial dalam peningkatan kecepatan pembangunan sosial dan ekonomi pedesaan (Khoirunisa & Khoiriawati, 2022). BUMDes merupakan entitas yang bercirikan desa dan kegiatannya tidak selalu berfokus pada mencari keuntungan saja, namun bisa pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan (Sukriani et al., 2018). BUMDes diharapkan akan menciptakan unit-unit usaha untuk memanfaatkan potensi ekonomi desa (Sukriani et al., 2018).

Adapun beberapa tujuan di dirikannya BUMDes yaitu antara lain untuk meningkatkan perekonomian desa, memaksimalkan sumber daya desa untuk kemakmuran desa, memperkuat upaya masyarakat dalam mengelola potensi desa, menyusun program kerjasama antar desa dan/atau dengan pihak luar, membuka lapangan kerja, menciptakan kesempatan masyarakat yang mendukung dan jaringan pasar untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik dan peningkatan rasa sejahtera bagi masyarakat dengan adanya layanan publik secara meningkat lagi (Ishak & Syam, 2020).

Sebagai organisasi keuangan tingkat desa yang membantu kebutuhan bisnis, BUMDes wajib menyajikan laporan keuangan bulanan yang transparan dan bertanggung jawab untuk setiap unit usaha (Sukriani et al., 2018). Sebagai bagian dari musyawarah desa, BUMDes juga harus melaporkan status kegiatannya kepada masyarakat setidaknya dua kali setahun (Sukriani et al., 2018). Dalam organisasi tersebut harus memiliki pertanggungjawaban dari pihak pengurus

terhadap masyarakat desa yaitu dengan membuat pembukuan atau laporan keuangan atas usahanya (Ratmasari et al., 2021). Pengurus BUMDes harus memiliki kemampuan, pemahaman terkait dengan pembukuan / laporan keuangan (Khoirunisa & Khoiriawati, 2022). Pertumbuhan setiap organisasi berbanding lurus dengan kualitas sumber daya manusianya (Khoirunisa & Khoiriawati, 2022). Seseorang akan lebih kompeten dan lebih mudah dalam menjalankan pekerjaan dan tugas yang menjadi tanggungjawabnya (Novia & Sujana, 2021). Begitu pula dengan pengurus BUMDes yang perlu memiliki kompetensi yang cukup terkait penyusunan laporan keuangan untuk melaporkan kondisi keuangan usaha tersebut kepada masyarakat desa.

Dalam menjalankan usaha, juga perlu adanya pengawasan dari berbagai pihak, untuk mencegah adanya kecurangan yang akan dilakukan. Ketidakpatuhan karyawan dan manajer terhadap sistem pengendalian internal perusahaan atau pemerintah saat ini terus meluas (Yendrawati, 2013). Karena pengelolaan keuangan daerah masih sangat kurang, keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan juga dapat terganggu, yang selanjutnya menurunkan kualitas laporan keuangan (Yendrawati, 2013). Badan usaha milik desa perlu juga adanya pengawasan atau pengendalian internal dari berbagai pihak untuk mencegah adanya kecurangan. Pengawasan atau pengendalian internal harus dilakukan secara rutin, sehingga lebih mengetahui alur atau kondisi laporan keuangan secara berturut-turut (Lestari & Dewi, 2020). Kemungkinan terjadinya kecurangan semakin besar, dan kesalahan yang tidak dapat dicegah mampu memberi pengaruh pada kualitas laporan keuangan yang disampaikan dari pemerintah, sehingga pengelolaan keuangan menjadi tidak transparan dan tidak bertanggung jawab (Nurcahyono et al., 2021).

Pada era sekarang teknologi informasi semakin berkembang pesat, akuntansi sangat penting untuk membantu penyebaran informasi transaksi moneter (Ishak & Syam, 2020). Dengan alat komunikasi seperti telepon, komputer, laptop, tablet, dan lainnya akan memudahkan dalam melakukan kegiatan sehari-hari, pekerjaan, serta dalam belajar mengajar. Informasi sekarang lebih mudah didapat melalui internet, dan dapat diakses kapan pun tanpa batas waktu. Teknologi informasi memiliki sumber informasi yang relevan, tepat, akurat, dan lengkap, yang sangat penting dalam dunia usaha (Riyadi et al., 2021). Penggunaan teknologi informasi juga sangat krusial dalam menentukan kualitas laporan keuangan. Karena teknologi informasi semakin bergantung pada teknologi komputer dan komunikasi yang dipakai dalam melakukan pengolahan data melalui beragam cara, antara lain mengolah, mengumpulkan, menggabungkan, menyimpan, dan mengolahnya menjadi informasi (Erawati & Tarigan, 2019). Penggunaan teknologi informasi mempermudah dalam pembuatan laporan keuangan. Pemrosesan serta penghapusan kesalahan dalam perhitungan akan mudah untuk diatasi dan lebih efektif dan efisien (Khoirunisa & Khoiriawati, 2022). Semua masyarakat desa dapat mengetahui kondisi keuangan BUMDes melalui web desa dalam pemrosesan informasi keuangan BUMDes.

Perkembangan BUMDes pada tahun 2017 semakin meningkat sebesar 32,29 persen di tahun 2021 dengan jumlah 57.288 BUMDes (Febrian, 2022). Diperkirakan bahwa tahun 2028 semua desa di Indonesia akan memiliki BUMDes dan perkiraan ini didasarkan pada anggapan bahwa kebijakan terkait desa dan BUMDes saat ini akan berlaku hingga tahun 2028 (Febrian, 2022). Salah satu cara untuk meningkatkan pasar yaitu dengan mengikuti kemajuan teknologi, melalui transformasi digital dalam pengelolaan BUMDes yang mampu menjadi peningkat

ekonomi dan rasa sejahtera masyarakat desa. Terdapat 1.852 BUMDes di Indonesia yang menggunakan teknologi untuk mempromosikan barang mereka secara online (Simanjuntak, 2022).

Di Kabupaten Jombang sudah mempunyai 302 BUMDes dari 302 Desa. Berdasarkan hasil konfirmasi dan observasi peneliti diketahui bahwa dalam penyusunan laporan keuangan BUMDes di Kabupaten Jombang sudah menggunakan aplikasi yaitu SIAP BUMDes. Namun masih ada beberapa BUMDes yang menyusun laporan keuangannya dengan menggunakan excel atau pembukuan biasa. Hal tersebut tergantung pada pihak personal atau pihak SDMnya, ada yang mampu dalam menggunakan komputer dan sudah tau dan mengerti terkait dengan aplikasi SIAP BUMDes dan ada yang tidak.

Untuk meningkatkan kompetensi pengelola BUMDes, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang bekerja sama dengan STIE PGRI Dewantara dalam program Kuliah Umum Sekolah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berdasarkan hasil konfirmasi diketahui bahwa kerjasama tersebut dilakukan selama lima tahun. Pada tahun 2022, sekolah BUMDes tersebut dihadiri oleh 30 BUMDes berdasarkan pengajuan dari usulan kecamatan. Tahun ini sekolah BUMDes juga di hadiri oleh 30 BUMDes, hal tersebut karena keterbatasan biaya dan ruang yang tidak memadai. Dengan adanya sekolah BUMDes ini diharapkan semua pengurus BUMDes di Kabupaten Jombang dapat mengikuti transformasi digital dan lebih mudah dalam menyusun laporan keuangan.

DPMD Kabupaten Jombang memfasilitasi untuk membantu pengelola BUMDes dalam melaksanakan penyusunan laporan keuangan yaitu melalui program pelatihan yang disebut Bintek Penyusunan Laporan yang diadakan setiap tahun. Pada tahun 2022, Bintek penyusunan laporan keuangan dilaksanakan dua

kali yaitu secara daring dan secara luring. Dalam Bintek tersebut tidak hanya memberikan pelatihan kepada pengurus BUMDes saja, tetapi juga kepada Person In Charge (PIC) dari tiap Kecamatan. Pihak PIC berfungsi untuk membantu BUMDes dalam penyusunan laporan keuangan.

Dengan upaya yang telah dilakukan, Kabupaten Jombang memperoleh penghargaan dari Kementerian Desa PDTT dalam peringatan Hari BUMDes yang diberikan kepada Bupati Jombang terhadap pencapaian seratus persen transformasi pengelolaan dana bergulir masyarakat Eks PNPM-Mpd menjadi BUMDes Bersama (Kusuma, 2023). Adanya penghargaan tersebut diharapkan BUMDes di Kabupaten Jombang terus berkinerja dengan baik sehingga dapat meningkatkan ekonomi desa. Ada beberapa BUMDes di Kabupaten Jombang yang menerima penghargaan, yaitu BUMDes Mojowarno yang menjadi Juara 1 Winner Sosial Media and Digital Marketing Category BUMDes Award 2020 (Redaksi Teras, 2020). Yang kedua ada BUMDes Ngampungan yang terpilih menjadi Desa BRllian yang berada pada peringkat 15 dari 500 desa atas kinerja baik dari BUMDesnya, sehingga terpilih menjadi Desa mandiri dan berkelanjutan (Rohmadi, 2021).

Perbedaan penelitian ini terhadap penelitian terdahulu yang dijalankan oleh Khoirunisa & Khoiriawati (2022) yakni dalam variabel independent, dan lokasi penelitian. Perbedaan pada variabel independent yaitu dengan menambahkan variabel baru seperti pengendalian internal. Variabel pengendalian internal digunakan sebagai variabel baru karena hasil penelitian sebelumnya tidak konsisten, dan peneliti akan melakukan uji kembali variabel tersebut. Yang menjadi pembeda dari kedua penelitian ini ialah lokasi penelitian. Sedangkan penelitian sebelumnya dijalankan pada BUMDes Kabupaten Karangrejo,

penelitian ini dijalankan pada BUMDes di Kabupaten Jombang untuk mengetahui temuan terbaru mengenai apakah variabel independen yang dievaluasi berdampak pada laporan keuangan BUMDes di Kabupaten Jombang dengan berbagai pertimbangan.

Pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa ada hubungan antara kompetensi, pengendalian internal, dan penggunaan teknologi informasi dan kualitas laporan keuangan. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “ **PENGARUH KOMPETENSI, PENGENDALIAN INTERNAL, DAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN BUMDES** “.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes di Kabupaten Jombang ?
2. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes di Kabupaten Jombang?
3. Apakah penggunaan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes di Kabupaten Jombang ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh kompetensi terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes di Kabupaten Jombang.

2. Untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes di Kabupaten Jombang.
3. Untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes di Kabupaten Jombang.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Diharapkan dari kajian ini akan meningkatkan pemahaman kita tentang dampak pengendalian internal, teknologi informasi, dan keahlian pada kualitas laporan keuangan BUMDes.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan dapat bermanfaat sebagai gambaran mengenai pengaruh kompetensi, pengendalian internal, dan penggunaan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes dan dapat juga digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat program-program yang berkaitan dengan BUMDes.

3. Bagi Badan Usaha Milik Desa

Pada penelitian ini, mampu digunakan menjadi bahan evaluasi dan pengembangan strategi dalam peningkatan kualitas laporan keuangan badan usaha Milik Desa di Kabupaten Jombang (BUMDes).